

**KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**Lampung Post**

**Tribun Lampung**

Halaman

**Radar Lampung**

11

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					✓								

## Kerusakan 700 Ruas Jalan di Lampura Sudah di Atas 50%

KERUSAKAN di 700 ruas jalan di Lampura Utara makin parah karena tidak adanya pembangunan dalam beberapa tahun terakhir sehingga menambahkan parah kondisi infrastruktur pendukung roda perekonomian warga tersebut. Untuk itu, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) melakukan langkah strategis guna memenuhi aspirasi rakyatnya.

"Kami melakukan survei guna mendapatkan data valid sesuai keadaan di lapangan. Ide itu tercetus pada akhir 2020 lalu dengan adanya total anggaran Rp8 miliar lebih," kata Kepala DPUPR Lampura, Syahrizal Adhar, Kamis (22/4).

Dia menjelaskan tahun lalu tidak ada satu pun do-

kumen yang menjelaskan tentang kondisi riil pendukung moda transportasi. Akibatnya, tidak ada pembangunan infrastruktur jalan pada 2020, baik dengan pembiayaan daerah (APBD) maupun pusat (DAK).

"Itulah kenapa tahun lalu praktis tidak ada pembangunan. Sekarang ini sudah ada, mudah-mudahan dapat segera terwujud karena ini adalah modal utamanya," katanya.

Dia menambahkan tingkat kerusakan di 700 ruas jalan tersebut sudah di atas 50%, khususnya jalan yang ramai aktivitasnya, seperti di sentralan Desa Sidokayo dan Skipi, Kecamatan Abung Barat. Untuk itu, harus ada solusi cepat agar tidak mengganggu roda perekonomian. "Selain

kerusakan parah, beberapa ruas jalan juga membutuhkan pelebaran," ujarnya.

Untuk perbaikan kerusakan 700 ruas jalan itu perlu anggaran lebih dari Rp6 triliun dan kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. "Kami akan coba mengajukan, baik melalui APBD maupun pusat (DAK). Kami akan duduk bersama keuangan dan Bappeda guna mencari solusi permasalahan tersebut," katanya.

Proyeksi pembiayaan dari kabupaten untuk 2021 senilai Rp33 miliar lebih. Jumlah itu masih sangat jauh dari kebutuhan sehingga nanti pelaksanaannya berdasar pada skala prioritas, khususnya yang menunjang roda perekonomian masyarakat. (FIT/D)